

## DAFTAR PUSTAKA

- Anton, F. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATIKA*, 1(2), 61–80.
- Ariani, K. R., & Putri, G. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah. *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, 364–369.
- BPK Provinsi Jawa Timur. (2019). Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Tulisan Hukum*, 1–17.
- BPKP. (2018). *Profil Kabupaten Kulon Progo*. <https://www.bpkp.go.id/diy/konten/834/Profil-Kabupaten-Kulonprogo>
- BPKP. (2020). *Sejarah Keistimewaan Yogyakarta*. <https://www.bpkp.go.id/diy/konten/815/Sejarah-Keistimewaan-Yogyakarta>
- Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>
- Darise. (2007). *Pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta : Indeks, 2007.
- Darwis, E. T. R. (2015). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Artikel Ilmiah*, 1–23.
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 107–119. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>
- Dimas. (2019). *Menggali Potensi Ekonomi Kabupaten Sleman Melalui Pengembangan Sektor Basis*. <https://www.kompasiana.com/dimas17964/5de35fc3097f36519f3aa132/menggali-potensi-ekonomi-kab-sleman-melalui-pengembangan-sektor-basis#:~:text=Kab.,dan jasa%2C serta sektor pariwisata.>
- DJPk Kementerian Keuangan. (2022). *Data Series APBD, Realisasi APBD, dan Neraca*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- DPMPT Bantul. (2021). *Potensi Investasi*. [https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/potensi\\_investasi/detail/24-sektor-perindustrian-dan-ekonomi-kreatif](https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/potensi_investasi/detail/24-sektor-perindustrian-dan-ekonomi-kreatif)
- DPMPTSP Kota Yogyakarta. (2022). *potensi pemkot yogya.pdf*.
- Ernawati, & Riharjo, I. B. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 531–545.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Spektrum Hukum*, 16(1),

119. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>
- Fitriyani, E. N. I., & Suwarno, A. E. (2021). Pengaruh Pad, Dau, Belanja Modal, Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Prosiding Senapan*, 1(1), 61–69.
- Frits, O. F. (2021). Perkembangan Kapasitas Fiskal Dan Ruang Fiskal Kota Kupang, 2010-2019 The Increasing of Fiscal Capacity and Fiscal Space in Kupang City, 2010-2019. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, VI(129), 1–15.
- Ghozali. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Cet.3)*. Jakarta Salemba Empat 2008.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Teori, konsep, dan aplikasi Akuntansi sektor publik : dari anggaran hingga laporan keuangan dari pemerintah hingga tempat ibadah (Cet. 1.)*. Jakarta : Salemba Empat, 2012.
- JDIH BPK RI. (2023). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. In *Oxford English Dictionary*. <https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28. <https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/162>
- JPNN Jogja. (2023). *Faktor-Faktor Perdorong Melonjaknya Pertumbuhan Ekonomi di Kulon Progo*. <https://jogja.jpnn.com/jogja-terkini/6651/faktor-faktor-perdorong-melonjaknya-pertumbuhan-ekonomi-di-kulon-progo>
- Kabupaten Bantul. (2020). *Sekilas Kabupaten Bantul*. [https://bantulkab.go.id/tentang\\_bantul/index/2020020001/sekilas-bantul.html](https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020020001/sekilas-bantul.html)
- KANWIL DJPb Prov. DIY. (2022). *Sejarah dan Letak Geografis Provinsi D.I. Yogyakarta*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/profil/sejarah.html>
- Kementrian Keuangan RI. (2017). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)* (*Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id*), 20, 20.
- Kulonprogokab. (2020). *Kondisi Umum Kulonprogo*. <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/7672/kondisi-umum>
- Lantara, F. (2023). *Perekonomian Pemkab Gunungkidul terus tumbuh positif*. ANTARA. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/225705/perekonomian-pemkab-gunungkidul-terus-tumbuh-positif>
- Mahabbani, F. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penertiban Vandalisme Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Wates Kulon Progo)*. 20–59. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/19803>
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE - Yogyakarta.
- Marizka, R. (2013). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA*

- KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT (TAHUN 2006 – 2011).*  
<https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/796/552>
- Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia (Fiscal Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia). *Law Reform*, 15(1), 149–163. <https://bit.ly/3NuLGxk>
- Mujiraharjo, F. N. (2017). Analisis Daya Saing Potensi Unggulan Kabupaten Sleman. *Teknoin*, 23(1), 49–55. <https://doi.org/10.20885/teknoin.vol23.iss1.art6>
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retriusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 623–635.
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174. <https://doi.org/10.25273/inventory.v3i2.5244>
- Nurhasanah, & Maria. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten dan kota di provinsi bengkulu. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), 60–73. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- Oktavianus Pasaloran. (2001). Teori Stewardship: TINJAUAN KONSEP DAN IMPLIKASINYA PADA AKUNTABILITAS ORGANISASI SEKTOR PUBLIK. In *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* (Vol. 9, Issue 2, pp. 1–14).
- Pemkab Gunungkidul. (2023). *Profil Singkat Kabupaten Gunungkidul*. <https://gunungkidulkab.go.id/beranda.php>
- Putra, A. N. (2013). ANALISIS POTENSI EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Slideshare.Net*, 2(1), 545–555. <https://www.slideshare.net/ALBICEE/lembar-observasi-siswa-50178674>
- Rangkasa, E. (2017). Penyelenggaraan otonomi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 617–636.
- Rinaldi, aditia. (2014). PENGARUH BELANJA PEGAWAI, MANDATORY SPENDING, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP FISCAL SPACE SELURUH PROVINSI DI SUMATERA. *Tesis*, 22–31.
- Rinaldi, U. (2013). Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Eksos*, 8(22), 105–113. <https://core.ac.uk/download/pdf/11718149.pdf>
- Rivandi, M., & Anggraini, Y. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 -2021. *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 -2021*, 20(1), 105–123.
- Sefira, M. V. P., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis PAD dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur 2019-2020. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(3), 938–

947.

- Simatupang. (2016). *Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (2010-2013)*.
- Sugiono, S. (2014). *PENGARUH MODERASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP HUBUNGAN BELANJA MODAL DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/download/8954/4013>
- Suryani, B. (2022). *Potret Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Wilayah DIY*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/12/20/510/1120806/potret-kemandirian-keuangan-pemerintah-daerah-lingkup-wilayah-diy>
- Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(6), 1–16.
- Wyatt, A. (2006). An accounting perspective. *The Management of Intellectual Property*, 40–65. <https://doi.org/10.4337/9781847201553.00009>
- Yani, A. (2002). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=44736&lokasi=lokal>